



# **Rencana Kerja (RENJA) BLHD Provinsi Banten Tahun 2016**

**Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)  
Provinsi Banten**

**Tahun 2015**



Badan Lingkungan Hidup Daerah  
**Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)**  
Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Palima Kota Serang  
Telp/Fax. (0254) 267094

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt, yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Rencana Kerja Badan Lingkungan hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 dapat terselesaikan dengan baik.

Tersusunnya Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan berjalan yang berorientasi pada peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 dapat mensinergikan dengan program dan kegiatan kabupaten/kota dan stakeholder yang lain yang mendukung pada pembangunan pengelolaan lingkungan hidup di Banten.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan selanjutnya.

Serang, Juni 2015  
**KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
PROVINSI BANTEN**

**Drs. M. Natsir Azis, M.Si, M.Kes**  
NIP. 19581012 198603 1 015

## **DAFTAR ISI**

---

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1    Latar Belakang .....	I-1
1.2    Landasan Hukum .....	I-4
1.3    Maksud dan Tujuan .....	I-7
1.4    Sistematika Penulisan .....	I-8
<b>BAB II   EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014</b>	
2.1    Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan Capaian Renstra BLHD Provinsi Banten .....	II-1
2.2    Analisis Kinerja Pelayanan BLHD Provinsi Banten .....	II-10
2.3    Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BLHD Provinsi Banten .....	II-12
2.4    Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	II-19
<b>BAB III  TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1    Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	III-1
3.2    Tujuan dan Sasaran Renja BLHD Provinsi Banten.....	III-3
3.3    Program dan Kegiatan Sumber Dana APBD .....	III-4
3.4    Program dan Kegiatan Sumber Dana APBN .....	III-6
<b>BAB IV  PENUTUP</b>	
4.1    Catatan penting.....	IV-1
4.2    Kaidah Pelaksanaan.....	IV-1
4.3    Rencana Tindak lanjut .....	IV-2
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

---

## **DAFTAR TABEL**

---

TABEL 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra BLHD Provinsi Banten s/d Tahun 2014 .....	II-2
TABEL 2.2	SPM Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Banten .....	II-11
TABEL 2.3	Kaitan Isu Strategis dan Rencana Pokok Kegiatan .....	II-18
TABEL 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2016.....	II-20

---

## **DAFTAR GAMBAR**

---

Gambar 1.1	Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen lainnya .....	I-3
Gambar 1.2	Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Provinsi.....	I-4

---

## **DAFTAR LAMPIRAN**

---

LAMPIRAN I	Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016
LAMPIRAN II	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten
LAMPIRAN III	Rekapitulasi Program dan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2016 Satuan Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten

# BAB

# I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang.

Penetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan titik tolak pelaksanaan perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu maupun antar fungsi pemerintahan daerah.

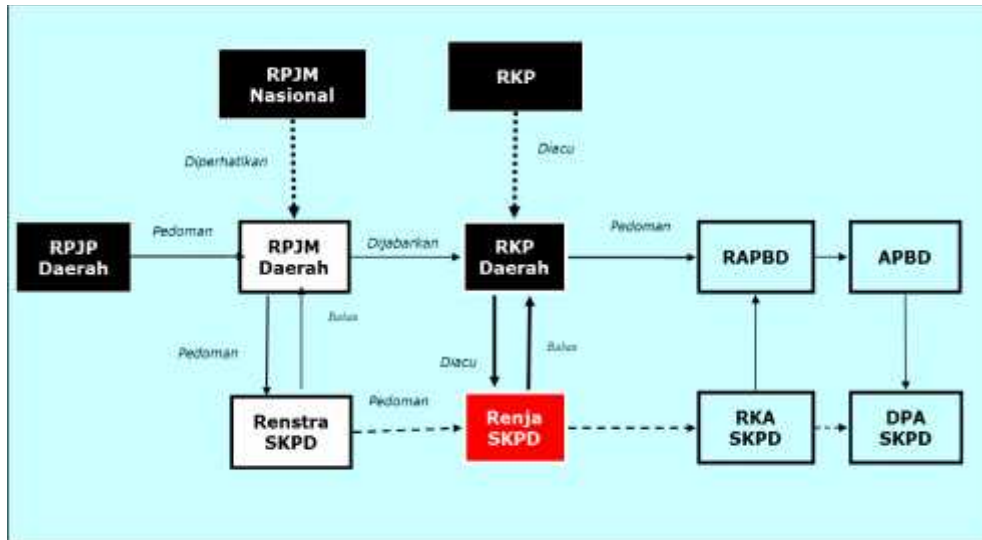
Terkait dengan kewajiban Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten sebagai salah satu perangkat daerah (SKPD) yaitu untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan).

Dengan berlakunya Undang-Undang UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan

dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antar daerah.

Renja Badan Lingkungan Hidup daerah Provinsi Banten merupakan penjabaran Renstra Badan Lingkungan Hidup daerah Provinsi Banten yang mengacu pada RPJMD Provinsi Banten. Renja Badan Lingkungan Hidup daerah Provinsi Banten memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Badan Lingkungan Hidup daerah Provinsi Banten dalam satu tahun anggaran. Dengan demikian, maka sebagai langkah awal proses perencanaan pembangunan tahunan, Badan Lingkungan Hidup daerah Provinsi Banten Provinsi Banten dimulai dari penyusunan rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Provinsi Banten Tahun 2016 dimana setiap SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada RPJMD Provinsi dan berpedoman pada Renstra-SKPD.

Adapun keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD dan dokumen lainnya dapat dilihat dalam gambar berikut:

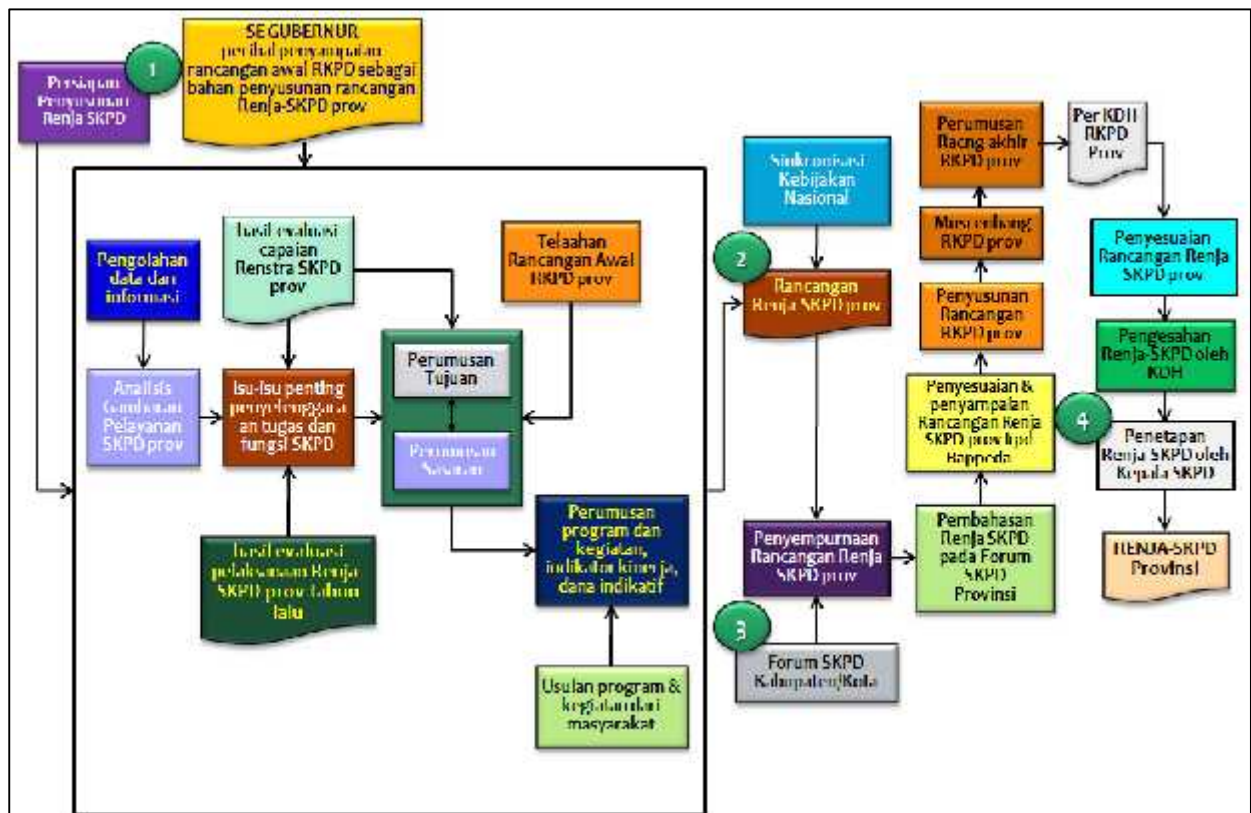


Gambar 1.1 Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen lainnya

Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dalam hal ini sebagai satuan kerja pemerintah daerah provinsi serta sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi Banten di Bidang Lingkungan Hidup. Maka kegiatan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 merupakan wujud dari tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten.

Tahapan Penyusunan Renja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dapat dilihat pada gambar berikut:





Gambar 1.2 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Provinsi

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelayanannya Aparatur Negara ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten;

17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017;
21. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan Renja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 yakni tersedianya suatu dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran untuk tahun 2016 yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah dalam bidang lingkungan hidup. Dengan demikian dokumen Renja dimaksud dapat dijadikan acuan dan pegangan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dan seluruh jajarannya selama periode tahun 2016 dalam melaksanakan pembangunan urusan lingkungan hidup secara efektif dan efisien.

Kegiatan Penyusunan Renja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 mencakup kegiatan koordinasi dan konsultasi pembangunan bidang lingkungan hidup yang melibatkan instansi terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se- Provinsi Banten.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 adalah :

1. Menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan daerah Provinsi Banten pada tahun 2016 di bidang Lingkungan Hidup;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten;
3. Sebagai acuan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2016.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 disusun dengan sistematika penyajian dan garis besar isi sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2016.

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014**

Memuat rangkaian Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten pada tahun-tahun sebelumnya berikut Capaian Renstra yang telah dilaksanakan, kemudian digambarkan Analisis Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten hingga akhirnya dapat disusun Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dan Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Pada bagian ini dikemukakan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan kebijakan Provinsi, Tujuan dan sasaran Renja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten. Selanjutnya disusun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2016.

**BAB IV PENUTUP**

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

# **BAB**

## **II**

# **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan Capaian Renstra**

#### **BLHD Provinsi Banten**

Pencapaian pelaksanaan pembangunan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten mulai Tahun 2014 merupakan penjabaran dari penyelenggaraan Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten yang ditandai dengan hasil pencapaian program kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Secara garis besar, pencapaian pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup Tahun 2014 pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten memiliki prosentase yang cukup baik.

Evaluasi pelaksanaan dan evaluasi Renja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten mulai Tahun 2014 pada masing-masing kegiatan sebagai berikut :

### **1. Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup**

Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan termasuk dalam program pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Indikator kegiatan ini adalah : penurunan beban pencemaran oleh usaha / industri, terpantaunya dan terinformasikannya kualitas air di wilayah provinsi banten menurut SPM, terpantaunya dan terinformasikannya kualitas udara ambien di wilayah provinsi Banten menurut SPM. Cakupan kegiatan tersebut meliputi : pengawasan dan pengendalian pencemaran air dan udara bagi industri, pembinaan teknis dan pengendalian pencemaran air dan udara bagi industri, pemantauan kualitas air sungai Ciujung, Cibanten dan Cirarab, pemantauan kualitas udara ambien. Secara fisik kegiatan tersebut telah mencapai 100 %.

### **2. Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik, Limbah B3 dan B3**

Kegiatan pengendalian pengelolaan limbah domestik, limbah B3 dan B3 termasuk dalam program pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Indikator kegiatan ini adalah : Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Limbah B3 dan B3; Prosentase Peningkatan penggunaan Refrigerant (freon) non CFC; dan jumlah capaian layanan persampahan kab/kota. Cakupan kegiatan tersebut meliputi : pembinaan teknis dan pengelolaan limbah B3, pengawasan tindak lanjut pengelolaan limbah industry, pembinaan teknis dan pengelolaan limbah medis, pengawasan tindak lanjut pengelolaan limbah medis/rumah sakit, rapat kerja teknis dan pengelolaan bahan perusak ozon, pengawasan dan pengendalian penggunaan bahan perusak ozon, pembinaan teknis dan pengelolaan bahan perusak ozon, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah perkotaan, penyusunan laporan evaluasi RAD GRK sektor limbah. Secara fisik kegiatan tersebut telah mencapai 100 %.



### **3. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan**

Kegiatan peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan termasuk dalam program pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Indikator kegiatan ini adalah : terlaksananya kegiatan pemantauan dan penilaian Adipura Kab/Kota se Banten; jumlah sekolah adiwiyata; dan peningkatan edukasi dan publikasi lingkungan hidup. Cakupan kegiatan tersebut meliputi : fasilitasi program adipura, fasilitasi program adiwiyata, publikasi lingkungan hidup, fasilitasi kaukus lingkungan hidup provinsi Banten dan penyusunan SLHD. Secara fisik kegiatan tersebut telah mencapai 100 %.

### **4. Pengkajian Dampak Lingkungan**

Kegiatan pengkajian dampak lingkungan termasuk dalam program pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Indikator kegiatan ini adalah : pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan; fasilitasi operasional komisi penilai amdal dan sekretariat amdal provinsi Banten; tersusunnya laporan pelaksanaan RKL/RPL dokumen lingkungan hidup kegiatan pemerintah provinsi Banten. Cakupan kegiatan tersebut meliputi : fasilitasi operasional komisi amdal dan sekretariat amdal provinsi Banten, fasilitasi rapat kerja regional amdal, rapat kerja komisi penilai amdal daerah provinsi dan kab/kota, pengawasan terhadap pelaksanaan RKL/RPL bagi usaha/kegiatan, penyusunan laporan RPL/RKL KP3B, Badiklat Banten dan RSUD Malingping. Secara fisik kegiatan tersebut telah mencapai 100 %.

## **5. Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup**

Kegiatan peningkatan penegakan hukum lingkungan termasuk dalam program pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Indikator kegiatan ini adalah : presentase pengawasan dan pembinaan terhadap usaha/kegiatan dalam penegakan hukum lingkungan hidup; tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran / kerusakan lingkungan hidup. Cakupan kegiatan tersebut meliputi : penanganan kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup BLHD Provinsi Banten, fasilitasi tim penegakan hukum lingkungan hidup terpadu Provinsi Banten, sosialisasi peraturan per-UUan dan teknis kepada pelaku usaha/kegiatan dan stake holder, rapat koordinasi dan evaluasi program penegakan hukum lingkungan hidup kabupaten / kota se-Provinsi Banten, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan kasus – kasus dan perusakan lingkungan hidup, bintek penataan hukum pada perusahaan di provinsi Banten. Secara fisik kegiatan tersebut telah mencapai 100 %.

## **6. Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan lingkungan**

Kegiatan peningkatan SDM dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan termasuk dalam program dalam program pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Indikator kegiatan ini adalah : tersedianya SDM dan sarana dan prasarana untuk laboratorium lingkungan; dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Cakupan kegiatan tersebut meliputi : bimtek peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan laboratorium lingkungan, rapat koordinasi pengelolaan laboratorium lingkungan hidup daerah, pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

hidup dan fasilitasi pelaksanaan SAKA Kalpataru. Secara fisik kegiatan tersebut telah mencapai 100 %.

## **7. Konservasi dan Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam**

Kegiatan konservasi dan rehabilitasi kerusakan sumberdaya alam termasuk dalam program dalam program rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Indikator kegiatan ini adalah : rakor penyusunan DAS Ciliman, pembentukan forum DAS Cisadane, pembentukan forum DAS seluruh Banten, workshop optimalisasi pengelolaan DAS dan KEHATI, penyusunan profil ekosistem DAS Cidanau, penyusunan profil ekosistem DAS Ciujung, Fasilitasi forum atau lembaga masyarakat dalam konservasi Kehati serta DAS; dan Pemantauan kerusakan hutan dan habitat keanekaragaman hayati. Cakupan kegiatan tersebut meliputi : Penyusunan profil ekosistem DAS Cidanau; Penyusunan profil ekosistem DAS Ciujung; Penyusunan profil ekosistem pegunungan akarsari; Rakor penyusunan forum DAS Ciliman; Pembentukan forum DAS Cisadane; Pembentukan forum DAS seluruh Banten; Workshop Optimalisasi Pengelolaan DAS dan KEHATI; Penyusunan profil keanekaragaman hayati dan kerusakan lahan di kawasan Akarsari; Pemantauan kerusakan hutan dan habitat keanekaragaman hayati di Kawasan Akarsari; workshop jasa lingkungan; fasilitasi kunjungan tamu dari luar provinsi; fasilitasi updating data gas rumah kaca sektor energi, sektor IPPU, sektor AFOLU dan sektor limbah. Secara fisik kegiatan tersebut telah mencapai 100 %.

## **8. Konservasi Sumberdaya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumberdaya Air**

Kegiatan konservasi sumberdaya air dan pengendalian kerusakan sumberdaya air termasuk dalam program rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Indikator kegiatan ini adalah : penanganan kerusakan DAS dan Situ /danau di wilayah provinsi Banten; penanganan kerusakan sumber mata air di wilayah provinsi Banten; dan penanganan ekosistem mangrove, pesisir dan laut di wilayah provinsi Banten. Cakupan kegiatan tersebut meliputi : Workshop sosialisasi program PERMATA; Penyusunan profil dan data kerusakan situ di wilayah provinsi Banten; Penyusunan profil dan data kerusakan mangrove di wilayah provinsi Banten; Bimbingan teknik penanganan kerusakan situ di wilayah provinsi Banten; Bimbingan teknik penanganan kerusakan mangrove di wilayah provinsi Banten. Secara fisik kegiatan tersebut telah mencapai 100 %.

## **9. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

Kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan termasuk dalam program peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Indikator kegiatan ini adalah : ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Cakupan kegiatan tersebut meliputi : forum SKPD bidang lingkungan hidup kab/kota, penyusunan rencana kerja BLHD Tahun 2015, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BLHD, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), penyusunan laporan SPM Bidang lingkungan hidup tingkat provinsi tahun 2014, fasilitasi penerapan dan pelaksanaan SPM Bid. Lingkungan hidup kab/kota, penyusunan LPPD BLHD Provinsi Banten, penyusunan dokumen RKAP/DPPA Tahun 2014 dan RKA/DPA tahun 2015,

penyusunan dokumen LKPJ BLHD, penyusunan perubahan rencana kerja tahun 2014, fasilitasi Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU), tindak lanjut hasil pemeriksaan. Secara fisik kegiatan tersebut telah mencapai 100 %.

#### **10. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset**

Kegiatan penyusunan laporan kinerja keuangan dan neraca aset termasuk dalam program peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Indikator kegiatan ini adalah : ketersediaan penatausahaan pengendalian dan evaluasi laporan keuangan. Cakupan kegiatan tersebut meliputi : penyusunan laporan keuangan triwulan I, penyusunan laporan keuangan semesteran/prognosis, penyusunan laporan keuangan triwulan III, penyusunan laporan keuangan akhir tahun, sosialisasi tata kelola keuangan. Secara fisik kegiatan tersebut telah mencapai 100 %.

#### **11. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran**

Kegiatan penyediaan barang dan jasa perkantoran termasuk dalam program peningkatan sarana, prasarana perkantoran dan kapasitas aparatur. Indikator kegiatan ini adalah : rasio penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan tata usaha dan kerumahtanggaan; Cakupan kegiatan tersebut meliputi : penyediaan tenaga kerja satpam, supir dan pramubakti/cleaning service dan operasional kantor, penyediaan penunjang operasional kantor selama 12 (dua belas) bulan, pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tugas pemerintahan. Secara fisik kegiatan tersebut telah mencapai 100 %.

#### **12. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor**

Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor termasuk dalam program peningkatan sarana, prasarana perkantoran dan kapasitas

aparatur. Indikator kegiatan ini adalah : rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur. Cakupan kegiatan tersebut meliputi : pemeliharaan gedung, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan perlengkapan kantor dan pemeliharaan komputer.. Secara fisik kegiatan tersebut telah mencapai 100 %.

### **13. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor**

Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor termasuk dalam program peningkatan sarana, prasarana perkantoran dan kapasitas aparatur. Indikator kegiatan ini adalah : rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur. Cakupan kegiatan tersebut meliputi pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep, alat alat angkutan darat bermotor roda dua, mesin tik, mesin absensi, perlengkapan halaman kantor, server, PC, Note book, printer, meja kerja, meja reseptionis, kuris tamu, tempat tidur, meubeulair, dispenser, tv, gordena, karpet, proyektor, layar proyektor, alat GPS, instalasi LAN, Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor. Secara fisik kegiatan tersebut telah mencapai 100,0 %.

### **14. Peningkatan Kapasitas Aparatur**

Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur termasuk dalam program peningkatan sarana, prasarana perkantoran dan kapasitas aparatur. Indikator kegiatan ini adalah : Prosentase Peningkatan Kapasitas dan pelayanan kepegawaian. Cakupan kegiatan tersebut meliputi : pekan ilmiah, fasilitasi kenaikan pangkat gaji berkala dan golongan PNS BLHD Provinsi Banten, serta pemutakhiran data kepegawaian. Secara fisik kegiatan tersebut telah mencapai 100 %.

## **15. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan**

Kegiatan penyediaan data dan informasi pembangunan termasuk dalam program penyediaan data dan informasi pembangunan daerah. Indikator kegiatan ini adalah : ketersediaan data dan informasi pembangunan. Cakupan kegiatan tersebut meliputi : penyusunan dan pengelolaan data dan informasi pembangunan, fasilitasi pelaksanaan PPID. Secara fisik kegiatan tersebut telah mencapai 100 %.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BLHD Provinsi Banten**

Berkaitan dengan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum khususnya mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM), Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten memiliki indikator SPM dalam bidang lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota.

Dalam SPM bidang lingkungan hidup, Pemerintahan daerah provinsi menyelenggarakan pelayanan yang terdiri atas :

- a. Pelayanan Informasi Status Mutu Air;
- b. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien;
- c. Pelayanan Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Tabel 2.2. SPM Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2014

NO	Indikator	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		2013	2014	2015	2016	2017		2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Pelayanan Informasi Status Mutu Air	20	40	60	80	100	100	100	100	
2	Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien	20	40	60	80	100	100	100	100	
3	Pelayanan Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.	20	60	70	90	100	82,35	100	100	

*Keterangan : Satuan dalam %;  
Sumber : Laporan SPM Bidang LH Tahun 2014*

Untuk pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup di Provinsi Banten, Badan Lingkungan Hidup Daerah akan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Langkah yang diambil dalam rangka mendukung target SPM ini adalah dengan melaksanakan program kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Pemantauan kualitas lingkungan
2. Peningkatan penegakan hukum lingkungan
3. Fasilitasi penerapan dan pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup kabupaten/kota.

Merupakan langkah pembinaan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota, antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada pemerintahan kabupaten/ kota untuk penyelenggaraan pelayanan bidang lingkungan hidup melalui pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan;



- b. Melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang lingkungan hidup.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BLHD**

#### **Provinsi Banten**

Memperhatikan perkembangan kondisi existing dan perkiraan mendatang, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten mempunyai isu strategis pada tahun 2016 ini adalah :

- Penurunan kualitas air  
Perkembangan jumlah dan kegiatan industri yang menghasilkan limbah cair berdampak pada meningkatnya tekanan terhadap penurunan kualitas (pencemaran) sumber daya air. Selain itu juga buangan limbah domestik (rumah tangga) ikut memberi dampak terhadap penurunan kualitas air.

Penurunan kualitas air akan menurunkan dayaguna, hasil guna, produktivitas, daya dukung dan daya tampung dari sumber daya air yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya alam (*natural resources depletion*).

Masih adanya pencemaran lingkungan di wilayah Provinsi Banten sebagai akibat pembangunan yang belum terkendali dan masih kurangnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran dari masyarakat pelaku kegiatan pembangunan terhadap pengelolaan lingkungan hidup maka diperlukan pengendalian pencemaran lingkungan yang terencana, terarah dan terpadu sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan mengacu pada UU No. 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Untuk memberikan pemahaman yang benar tentang pengelolaan lingkungan perlu adanya sistem pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang terencana, terarah dan berkesinambungan.

- Pencemaran dan Penurunan kualitas udara

Indikator kualitas udara mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 thn 1999 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan SK Menaker No. 51/Menaker/1999 tentang Nilai Ambang Batas (NAB). Parameter yang diukur dalam menentukan tingkat pencemaran udara antara lain CO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, CO, NH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>S, HC, Pb, kandungan debu dan tingkat kebisingan. Apabila salah satu dari komponen pencemar udara misalnya CO<sub>2</sub> yang merupakan salah satu parameter yang digunakan sebagai indikator pencemaran udara meningkat hingga melampaui nilai ambang batas (NAB) yang dipersyaratkan, akan membahayakan dan berakibat buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Nilai baku mutu udara ambien dari tiap parameter menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 thn 1999 dan nilai ambang batas (NAB) menurut SK Menaker No. Kep 51/Menaker/1999 adalah kebisingan (60 dBA), debu (230 µg/m<sup>3</sup>), CO (10.000 µg/m<sup>3</sup>), NO<sub>2</sub> (150 µg/m<sup>3</sup>), SO<sub>2</sub> (365 µg/m<sup>3</sup>), HC (160 µg/m<sup>3</sup>), Pb(2 µg/m<sup>3</sup>), NH<sub>3</sub> (1360 µg/m<sup>3</sup>), H<sub>2</sub>S (42 µg/m<sup>3</sup>).

Pencemaran udara di Propinsi Banten terutama di daerah perkotaan dari waktu ke waktu diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan laju pertumbuhan pembangunan di berbagai sektor seperti sektor industri, perhubungan/ transportasi dan pariwisata. Hal ini perlu mendapatkan perhatian secara serius dan perlu penanganan atau pengendalian secara baik dan komprehensif antara instansi terkait.

- Terjadinya peningkatan pencemaran limbah domestik, B3 dan limbah B3  
Limbah cair domestik adalah limbah cair yang berasal dari kegiatan makhluk hidup (manusia) sehari-hari dalam sebuah pemukiman. Secara kuantitatif jumlah limbah cair domestik yang dibuang relatif tidak terlalu besar, namun jika pemukiman tersebut padat, maka pembuangan limbah cair domestik dapat menimbulkan permasalahan tersendiri. Berdasarkan gambaran tersebut dapat dijelaskan mengapa permasalahan limbah cair domestik akan bertambah besar seiring dengan adanya peningkatan jumlah penduduk.

Bahan organik yang terdapat pada limbah cair domestik dapat memberikan dampak terhadap adanya proses oksidasi perairan yang akan menurunkan jumlah oksigen dalam air. Selain itu adanya bahan organik dan nutrien akan memacu pertumbuhan alga dan tanaman air lainnya dengan cepat (eutrofikasi). Zat padatan yang terdapat dalam limbah cair sangat mempengaruhi kondisi perairan secara fisik dan juga secara tidak langsung dapat menimbulkan sedimentasi. Sedangkan mikroorganisme koliform dapat menimbulkan bahaya penyakit bagi manusia.

Macam industri/aktivitas yang ada di Propinsi Banten sangat beragam, dari industri kecil menengah, rumah sakit, pariwisata, sampai industri besar yang memiliki resiko lingkungan yang tinggi. Industri kecil yang ada di Provinsi Banten didominasi oleh industri pangan, kerajinan logam dan penambangan emas dan pasir. Sedangkan industri besar di wilayah ini umumnya adalah industri kimia, logam dasar dan industri berbasis petroleum. Limbah cair yang keluar dari kegiatan industri harus diperhatikan dan diupayakan pengelolaannya agar pengaruh negatif (pencemaran) dapat diminimalkan. Dampak limbah cair ini tidak hanya

merusak lingkungan, tetapi secara langsung juga dapat membahayakan manusia/makhluk hidup, terutama sekali limbah cair yang memiliki sifat berbahaya dan beracun (B3).

Limbah cair industri kecil selama ini belum dilakukan pengelolaan secara benar, terkadang limbah cair tersebut dibuang langsung ke lingkungan. Kendala yang paling utama adalah masalah biaya pembuatan instalasi pengolahan limbah yang tinggi dan industri kecil tersebut tidak mampu membuatnya. Selain itu juga masalah teknologi pengolahan limbah yang belum diketahui oleh sebagian besar industri kecil. Walaupun sebagian besar industri kecil tersebut menghasilkan limbah cair tidak berbahaya dan dalam jumlah yang sedikit, namun ada beberapa industri kecil di Propinsi Banten memiliki potensi kerusakan lingkungan yang tinggi.

- Terjadinya Kerusakan Ekosistem Laut

Pencemaran dapat berasal dari limbah yang dibuang oleh berbagai kegiatan (seperti tambak, perhotelan, pemukiman, industri, dan transportasi laut) yang terdapat di dalam wilayah pesisir; dan juga berupa kiriman dari berbagai dampak kegiatan pembangunan di bagian hulu. Sedimentasi atau pelumpuran yang terjadi di perairan pesisir sebagian besar berasal dari bahan sedimen di bagian hulu (akibat penebangan hutan dan praktek pertanian yang tidak mengindahkan asas konservasi lahan dan lingkungan), yang terangkut aliran air sungai atau air limpasan dan diendapkan di perairan pesisir.

Kegiatan pengolahan pertanian dan kehutanan (*up land*) yang buruk tidak saja merusak ekosistem sungai (melalui banjir dan erosi), tetapi juga akan menimbulkan dampak negatif pada perairan pesisir dan pantai. Sementara itu, kerusakan lingkungan yang berasal dari wilayah pesisir, pantai dan laut bisa berupa degradasi fisik habitat pesisir (mangrove,

terumbu karang dan padang lamun); abrasi pantai; hilangnya daerah konservasi/kawasan lindung; eksploitasi sumberdaya alam yang berlebih (over exploitation); dan bencana alam.

- Perubahan Iklim Akibat Pemanasan Global

Dampak kerusakan lingkungan hidup seperti pemanasan global, saat ini sudah mulai dirasakan di berbagai belahan bumi ini. Seperti terjadinya peningkatan suhu udara, permukaan air laut naik, yang bisa menenggelamkan pulau-pulau kecil, dan daratan di sekitar pantai, terjadinya perubahan iklim, yang kini sudah terjadi di beberapa tempat termasuk di negeri ini. Kesemua itu karena lingkungan tempat manusia dan makhluk hidup lainnya sudah tercemar. Bahkan menurut sumber-sumber yang bisa dipercaya, keganasan topan yang akhir-akhir ini suka melanda salah satu bagian di daratan Amerika, diprediksi oleh para ahli sebagai efek dari pemanasan global. Ancaman lain yang tidak kalah bahayanya bagi kehidupan manusia, adalah terjadinya hujan asam.

Di Indonesia sendiri, memasuki tahun 2006 telah terjadi angin badai di beberapa perairan yang mengakibatkan banjir di daerah sekitar pantai hingga sehari-hari. Akibatnya para nelayan tidak bisa turun ke laut untuk mencari ikan, sehingga mereka mengalami masa-masa paceklik. Belum lagi lebatnya curah hujan mengakibatkan banjir dan tanah longsor di beberapa daerah. Kejadian-kejadian ini tentu masih punya kaitan dengan pemanasan global akibat kerusakan lingkungan. Kalau penyebab-penyebab kerusakan global ini tidak ditanggulangi untuk ditekan sekecil mungkin, tentu kerusakan lingkungan yang sudah terjadi ini akan semakin parah yang akibatnya juga akan merugikan semua makhluk hidup termasuk kita.

Penyumbang terbesar kerusakan lingkungan hidup secara menyeluruh, adalah polusi yang ditimbulkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, seperti batubara, bahan bakar minyak, dan gas alam secara besar-besaran. Dari pembakaran itu berakibat terjadinya emisi rumah kaca sebagai penyebab pemanasan global.

- Rendahnya kesadaran masyarakat yang dalam pemeliharaan lingkungan  
Dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai anggota masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya, misalnya dengan membuang sampah seenaknya di jalanan, atau meletakkan sampah di pinggir jalan seolah bukan miliknya lagi.

Banyak yang tidak menyadari bahwa pola kehidupan modern saat ini sangat mempengaruhi lingkungan dan kondisi bumi secara keseluruhan. Kemakmuran yang semakin tinggi telah memberikan fasilitas hidup semakin mudah melalui perkembangan teknologi. Akibatnya penggunaan listrik terutama untuk keperluan rumah tangga menjadi sangat besar dan terus menerus seperti lemari es, mesin cuci, komputer, AC, audio dan sebagainya. Sedangkan kebiasaan shopping atau memborong belanjaan menyebabkan bertumpuknya sampah kantong plastik, piring, cangkir atau botol plastik, dan sebagainya.

Masalah lingkungan hidup merupakan suatu fenomena besar yang memerlukan perhatian khusus dari semua pihak. Setiap orang diharapkan berpartisipasi dan bertanggung jawab untuk mengatasinya.

- Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Disamping isu-isu strategis terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup di provinsi Banten, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik

(good governance) menjadi prioritas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan isu-isu dan permasalahan di atas, maka diperlukan upaya dan rencana tidak lanjut yang kemudian menjadi rencana pokok kegiatan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten pada tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 2.3. Kaitan Isu Strategis dan Rencana Pokok Kegiatan Tahun 2016

Isu-isu strategis	Kegiatan Pokok 2016
Penurunan kualitas udara dan air	Pemantauan kualitas lingkungan, pengkajian dampak lingkungan, peningkatan penegakan hukum lingkungan. Pengujian dan analisis laboratorium untuk seluruh komponen lingkungan
Terjadinya peningkatan pencemaran limbah domestik, B3 dan limbah B3	Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik, Limbah B3 Dan B3
Terjadinya Kerusakan Ekosistem Laut dan Perubahan Iklim Akibat Pemanasan Global	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air, Konservasi dan Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam
Rendahnya kesadaran masyarakat yang dalam pemeliharaan lingkungan	Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan lingkungan, Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )	Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset, Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Parasarana Aparatur, Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, Peningkatan kapaistas aparatur, rapat koordinasi ke dalam dan keluar daerah.

#### 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review Renja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :





Bab II  
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2016

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup				5.036.176.503	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup				12.160.457.600	
		Provinsi Banten	Persentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM (%)	20%			Provinsi Banten	Persentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM (%)	20%		
		Provinsi Banten	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	20%			Provinsi Banten	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	90%		
2	Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup				2.315.604.373	Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup				3.335.680.000	

Bab II  
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Provinsi Banten	Persentase peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung (%)	20%	1.000.478.561	Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Provinsi Banten	Persentase peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung (%)	20%	1.150.000.000	
		Provinsi Banten	Rasio Ketersediaan penatausahaan pengendalian dan evaluasi laporan keuangan	100%			Provinsi Banten	Rasio Ketersediaan penatausahaan pengendalian dan evaluasi laporan keuangan	100%		
		Provinsi Banten	Rasio Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan Rencana Pembangunan SKPD	100%			Provinsi Banten	Rasio Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan Rencana Pembangunan SKPD	100%		
	Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur				1.027.712.885	Program Peningkatn Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur				13.982.730.500	
			Rasio Penyediaan Barang Jasa Adm. Perkantoran serta pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtangaan	100%				Rasio Penyediaan Barang Jasa Adm. Perkantoran serta pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtangaan	100%		

Bab II  
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke luar daerah	100%				Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke luar daerah	100%		
			Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur	100%				Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur	100%		
			Rasio pembinaan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian	100%				Rasio pembinaan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian	100%		
	Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah				214.379.755	Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah				250.000.000	
			Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	100%				Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	100%		

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi melalui penyelenggaraan Forum SKPD Bidang Lingkungan Hidup dan mengacu pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, Kegiatan yang perlu diakomodir Provinsi Banten dalam pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten/kota adalah :

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku  
Kepentingan Tahun 2016

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup</b>				
	Pembinaan terhadap Komisi Amdal Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Banten	Pembinaan terhadap Komisi Amdal Daerah Kabupaten/Kota		
	Pembinaan pengelolaan B3 dan limbah B3	Provinsi Banten	Pembinaan pengelolaan B3 dan limbah B3		
	Pembinaan terkait dengan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup	Provinsi Banten	Percepatan dan penerapan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup		
	Tidak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran lintas kabupaten/kota	Kota Cilegon	Tidak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran lintas kabupaten/kota		
	Fasilitasi pengadaan alat pemantau udara (stasioner/portable)	Kota Cilegon	Pengadaan alat pemantau udara (stasioner/portable)	1 paket	
	Pembinaan dalam rangka optimalisasi program Adipura dan Adiwiyata.	Provinsi Banten	Fasilitasi pelaksanaan Adipura dan Adiwiyata.		
	Penyelenggaraan kampanye lingkungan hidup	Kota Tangerang Selatan	Peningkatan Edukasi lingkungan hidup		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam Rangka Optimalisasi Lab LH Daerah	Provinsi Banten	Peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam Rangka Optimalisasi Lab LH Daerah		
	Sosialisasi dan Pembinaan masyarakat pengelola lingkungan hidup	Provinsi banten			
II	<b>Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup</b>				
	Penanganan lebih lanjut DAS Ciujung	Kab. Serang, Kab. Pandeglang	Penanganan lebih lanjut DAS Ciujung		
	Peningkatan kelembagaan hutan mangrove	Kota Serang, Kab. Serang	Peningkatan kelembagaan hutan mangrove		
	Fasilitasi forum DAS Cibanten	Kota Serang	Fasilitasi forum DAS Cibanten		

# BAB

## III

# TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Agenda pembangunan nasional yang terangkum dalam nawacita yaitu 1). menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara 2). mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya 3). membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan 4). Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya 5). meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia 6). meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional 7). mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik 8). melakukan revolusi karakter bangsa 9). mempertahankan kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Komitmen pemerintah dalam menerapkan pembangunan yang berkelanjutan terlihat pada norma pembangunan kabinet kerja :

- a. Membangun untuk manusia dan masyarakat
- b. Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar, perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisanmenengah ke bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan.
- c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

Rencana kerja pemerintah (nasional) Tahun 2016 memiliki rancangan tema ***“Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meletakkan fondasi pembangunan yang berkualitas”***, dimana prioritas pembangunan nasional dititikberatkan pada tiga fokus :

1. Pembangunan sektor unggulan (kedaulatan pangan, energi ketenagalistrikan, kemaritiman, dan pariwisata)
2. Pembangunan kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan)
3. Pengurangan kesenjangan (antarkelompok pendapatan, antarwilayah)

Sedangkan tema pembangunan daerah Provinsi Banten pada Tahun 2016 adalah: ***“Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing SDM untuk Kesejahteraan Rakyat Banten yang Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian dan Berkeadilan”***

Prioritas RKPD Provinsi Banten tahun 2016 antara lain:

1. Peningkatan kapasitas tenaga kerja dan pengurangan tingkat pengangguran.

2. Perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan antisipasi kerawanan sosial.
3. Pemantapan ketahanan pangan
4. Peningkatan daya saing investasi, pemasaran investasi dan komoditas
5. Peningkatan konektivitas dan daya dukung kawasan pusat pertumbuhan;
6. Peningkatan kapasitas pendidikan berbasis kompetensi pasar kerja
7. Optimalisasi infrastruktur pelayanan kesehatan dan integrasi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat;
8. Pengendalian tata ruang, kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya air, mitigasi serta adaptasi bencana;
9. Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
10. Peningkatan keamanan, ketertiban dan kondusifitas masyarakat.

Mengacu pada prioritas nasional dan prioritas Provinsi Banten, prioritas penanganan pembangunan terkait Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 berada pada dukungan prioritas berikut:

### **1. Pelestarian Lingkungan Hidup, Mitigasi dan Adaptasi Bencana**

- a. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup
- b. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

### **2. Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah**

- a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah
- b. Peningkatan sarana, prasarana perkantoran dan kapasitas aparatur
- c. Penyediaan data pembangunan daerah

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BLHD Provinsi Banten**

Tujuan yang telah dirumuskan untuk dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan :

- a. Meminimalkan dampak lingkungan akibat pembangunan.



- b. Meningkatkan pentaatan Hukum Lingkungan.
- c. Meningkatkan Akses Informasi Lingkungan Hidup.
- d. Meningkatkan koordinasi dalam pengendalian dampak lingkungan

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya penataan lingkungan melalui RPPLH, KLHS, AMDAL, UPL-UKL, SPPL dan Izin lingkungan
2. Terwujudnya kondisi lingkungan hidup yang sesuai dengan baku mutu lingkungan melalui kegiatan pengawasan berupa PROPER, Wasdal, Superkelola, Adaptasi Perubahan iklim (RAD GRK) dan persampahan
3. Terwujudnya pemahaman dan kesadaran masyarakat melalui MIH, Rehabilitasi dan konservasi danau, situ, penutupan lahan, ekosistem pesisir, perlindungan mata air, DAS dan keanekaragaman hayati.
4. Terwujudnya pelayanan informasi dan peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan melalui kampanye lingkungan, diklat, bimtek, sosialisasi, penguatan kelembagaan, adiwiyata, adipura, penyusunan SLHD dan sistem informasi lingkungan
5. Terwujudnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pentaatan hukum lingkungan melalui sosialisasi peraturan perundangan, pos pengaduan, penanganan sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan

### **3.3. Program dan Kegiatan Sumber Dana APBD**

Dengan telah ditetapkan prioritas-prioritas penanganan Tahun 2016, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten melaksanakan program kegiatan sumber APBD dengan gambaran umum sebagai berikut:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.  
Terdiri dari 5 program dan 21 kegiatan

- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

Sebagian besar program kegiatan tersebar di seluruh provinsi Banten.

- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

total kebutuhan dana sebesar : Rp. 17.000.000.000,-

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten periode Tahun 2012-2017 berdasarkan bidang urusan dan indikator kinerjanya antara lain sebagai berikut:

**I. Bidang Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian**

1. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah, indikator kinerja programnya adalah:
  - a. Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan, kegiatannya adalah:
    - Penyusunan Pelaporan Kinerja Keuangan dan Aset
  - b. Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, kegiatannya adalah:
    - Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur, indikator kinerja programnya adalah:
  - a. Rasio Penyediaan Barang Jasa Adm. Perkantoran serta pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan, kegiatannya adalah:
    - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
  - b. Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan keluar daerah, kegiatannya adalah:
    - Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

- c. Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur, kegiatannya adalah:
  - Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
  - Pengadaan sarana dan prasarana kantor
- d. Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian, kegiatannya adalah:
  - Peningkatan kapasitas aparatur

## **II. Bidang Statistik**

3. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah, indikator kinerja programnya adalah:  
Ketersediaan data pembangunan daerah, kegiatannya adalah:
  - Penyediaan Data dan Informasi pembangunan daerah

## **III. Bidang Lingkungan Hidup**

4. Program pengendalian pencemaran lingkungan hidup, indikator kinerja programnya adalah:
  - a. Terpantau dan terinformasikannya status kualitas air menurut SPM, kegiatannya adalah:
    - Pemantauan kualitas lingkungan
    - Pengendalian pengelolaan limbah domestik, limbah B3 Dan B3
    - Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
    - Pengkajian dampak lingkungan
    - Peningkatan SDM dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
    - Pengujian dan analisis laboratorium untuk seluruh komponen lingkungan
    - Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan

- b. Rasio jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti, kegiatannya adalah:
  - Peningkatan penegakan hukum lingkungan
- 5. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, indikator kinerja programnya adalah:  
Peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung, kegiatannya adalah:
  - Konservasi dan Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam
  - Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air

Adapun rencana Program dan Kegiatan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 sumber dana APBD disajikan dalam lampiran.

#### **3.4. Program dan Kegiatan Sumber Dana APBN**

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia memandang perlu untuk menyelenggarakan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah. Dekonsentrasi Bidang LH tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan dan menunjang pencapaian sasaran prioritas nasional yang termuat dalam program pengelolaan lingkungan hidup dan menunjang sasaran prioritas nasional yang termuat dalam Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama meningkatnya pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi, menurunnya pencemaran lingkungan pada air, udara, sampah dan limbah B3, memastikan penghentian kerusakan lingkungan di Daerah Aliran

Sungai (DAS), tersedianya kebijakan di bidang perlindungan atmosfer dan pengendalian dampak perubahan iklim, dan meningkatnya kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Untuk memperlancar pencapaian sasaran-sasaran strategis tersebut dan pemenuhan mandat UU Nomor 32 Tahun 2009, Maka Menteri Negara Lingkungan Hidup di 32 Provinsi melaksanakan kegiatan Peningkatan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup. Salah satu indikator kinerja kegiatan adalah jumlah Provinsi yang menyelenggarakan pengendalian pencemaran lingkungan.

Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten sebagai organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten melaksanakan program kegiatan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup dengan gambaran umum sebagai berikut:

- Jumlah program dan kegiatan.  
Terdiri dari 1 program , 3 kegiatan
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).  
Sebagian besar program kegiatan tersebar di seluruh provinsi Banten.
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.  
total kebutuhan dana sebesar : Rp. 2. 300.000.000,-

Adapun rencana Program dan Kegiatan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 sumber dana APBN disajikan dalam lampiran.

# BAB IV | PENUTUP

## 4.1. Catatan Penting.

Yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2016 adalah pencapaian target kinerja sesuai rencana, sehingga dapat memudahkan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan. Sedangkan, jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, dapat dipilih penanganan sesuai kebutuhan prioritas sesuai arahan dan isu strategis yang harus dilaksanakan.

## 4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.

Untuk merealisasikannya memiliki 5 (lima) prinsip utama yaitu :

- a. Prinsip perencanaan kegiatan mengacu kepada prinsip perencanaan yang cerdas (*SMART Planning*), yaitu kegiatan terpilih harus diyakini argumentatif memiliki kekhususan (*Specific*), terukur (*Measurable*),

ketercapaian (*Achievable*), ketersediaan sumber daya (*Resources Availability*), dan waktu (*Time*). Pemilihan kegiatan melalui arah fokus pembangunan yang merujuk pada rencana capaian kinerja berdasarkan bidang pada setiap misi pembangunan, merupakan tujuan bersama yang pencapaiannya membutuhkan sinergitas lintas SKPD, antar tingkatan pemerintahan dan dunia usaha maupun masyarakat, terdiri atas : peningkatan kualitas pendidikan; peningkatan kualitas kesehatan; peningkatan daya beli masyarakat; kemandirian pangan; peningkatan kinerja aparatur; pengembangan infrastruktur wilayah; kemandirian energi dan kecukupan air baku; penanganan pengelolaan bencana; dan pembangunan perdesaan.

- b. Prinsip administrasi perencanaan, yaitu menggunakan *Shewhart Cycle* yang dikenal dengan siklus PDCA dengan tahapan : Rencanakan (*Plan*), Kerjakan apa yang telah direncanakan (*Do*), Periksa atau monitor pelaksanaan (*Check*), dan Aksi tindak lanjut).
- c. Prinsip pelaksanaan program dan kegiatan menggunakan prinsip akuntabilitas (*accountability*) yang memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu :
  1. Taat dan sesuai aturan
  2. Sesuai dengan norma profesionalisme
  3. Berorientasi pada hasil yang berkualitas (*Quality Result Driven*).
- d. Prinsip dukungan kebijakan keuangan mengikuti kebutuhan program terpilih (*Money Follow Program Selected Policy*);

#### **4.3. Rencana Tindak lanjut.**

- Berdasarkan isu-isu strategis dan permasalahan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka diperlukan upaya dan rencana tindak lanjut yang

kemudian menjadi rencana pokok kegiatan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten pada tahun 2016 sebagai berikut :

- a. Program pengendalian pencemaran lingkungan hidup
  1. Pemantauan Kualitas Lingkungan
  2. Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik, Limbah B3 Dan B3
  3. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
  4. Pengkajian Dampak Lingkungan
  5. Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
  6. Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan lingkungan
  7. Pengujian dan analisis laboratorium untuk seluruh komponen lingkungan
  8. Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan
- b. Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup
  9. Konservasi dan Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam
  10. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air
- c. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
  11. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
  12. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset BLHD
- d. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
  13. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
  14. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium
  15. Rakor kedalam dan keluar daerah
  16. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
  17. Pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Laboratorium



18. Pengadaan sarana dan prasarana kantor
  19. Peningkatan kapasitas aparatur
  20. Peningkatan kapasitas aparatur pada UPT Laboratorium
- e. Penyediaan Data Pembangunan Daerah
21. Penyediaan Data dan Informasi pembangunan
- Dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2016 perlu dilaksanakan penerapan kaidah-kaidah pelaksanaan seperti yang disebutkan sebelumnya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten.

Serang, Juni 2015  
Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah  
Provinsi Banten

**Drs. M. Natsir Azis, M.Si, M.Kes**  
NIP. 19581012 198603 1 015

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI BANTEN**

**TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Indikator Kinerja Kegiatan (Tolak Ukur)	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan M	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Per Program/Kegiatan/Tolak Ukur	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	<b>Urusan Wajib</b>								
1	8	<b>Lingkungan Hidup;</b>							
1	8	1	<b>Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup</b>						
			Persentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM (%)						
			Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup (%)						
1	8	1	1	<b>Pemantauan Kualitas Lingkungan</b>		1,400,000,000	APBD		
			1	Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara Bagi Industri Sektor Manufaktur, Prasarana dan Jasa	Provinsi Banten	30 Industri	219,400,100		30 Industri
			2	Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara Bagi Industri Sektor Agro	Provinsi Banten	10 Industri	93,111,500		10 Industri
			3	Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara Bagi Industri Sektor Pertambangan, Energi dan Mineral	Provinsi Banten	10 Industri	89,493,500		10 Industri
			4	Pembinaan Teknis Pengendalian Pencemaran Air dan Udara Bagi Industri	Provinsi Banten	40 Industri	133,554,100		40 Industri
			5	Pemantauan Kualitas Air Sungai Ciujung	Kab. Serang, Kab. Lebak	8 titik, 10 kali pemantauan	257,896,650		8 titik, 10 kali pemantauan
			6	Pemantauan Kualitas Air Sungai Cibanten	Kota Serang, Kab. Serang	6 titik, 10 kali pemantauan	244,824,500		6 titik, 10 kali pemantauan
			7	Pemantauan Kualitas Air Sungai Cirarab	Kab. Tangerang, Kab. Serang	8 titik, 10 kali pemantauan	263,661,650		8 titik, 10 kali pemantauan
			11	Pemantauan Kualitas Udara Ambien	8 Kab/Kota	21 titik pantau	98,058,000		21 titik pantau
1	8	1	2	<b>Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik, Limbah B3 Dan B3</b>			1,355,000,000	APBD	-
			1	Pembinaan Teknis pengelolaan Limbah B3 industri	Provinsi Banten	60 Peserta (Industri), 1 Dokumen	167,730,000		60 Peserta (Industri), 1 Dokumen
			2	Pengawasan Tindak Lanjut Pengumpul dan Pengolah Limbah B3	Provinsi Banten	20 Industri, 1 Laporan	42,585,000		20 Industri, 1 Laporan
			3	Pengawasan Tindak Lanjut Penghasil Limbah B3	Provinsi Banten	40 Industri, 1 Laporan	61,325,000		40 Industri, 1 Laporan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Indikator Kinerja Kegiatan (Tolak Ukur)	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan M
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Per Program/Kegiatan/Tolak Ukur	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		4 Verifikasi Administrasi Pelaporan Pengelolaan Limbah B3	Provinsi Banten	1 Dokumen	24,185,000			1 Dokumen
		5 Verifikasi Administrasi & Teknis Permohonan Rekomendasi & Ijin Pengumpulan Limbah B3	Provinsi Banten	4 Ijin/Rekom	56,314,000			4 Ijin/Rekom
		6 Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahan Perusak Ozon	Provinsi Banten	40 Bengkel AC, 1 Laporan	143,619,000			40 Bengkel AC, 1 Laporan
		7 Pembinaan Teknis Penanggulangan Bahan Perusak Ozon	Provinsi Banten	40 Peserta (Teknisi AC), 1 Dokumen	143,574,000			40 Peserta (Teknisi AC), 1 Dokumen
		8 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Domestik	8 Kab/Kota	1 Laporan	117,793,000			1 Laporan
		9 Pengawasan & Pengendalian Limbah Medis Rumah Sakit	Provinsi Banten	40 Rumah Sakit, 1 Laporan	62,015,000			40 Rumah Sakit, 1 Laporan
		10 Pembinaan Teknis Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit	Provinsi Banten	40 Peserta (RS), 1 Dokumen	145,727,000			40 Peserta (RS), 1 Dokumen
		11 Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan & Pengendalian Limbah B3 Industri Sektor Pengumpul & Pengolah	Provinsi Banten	1 Dokumen	46,772,000			1 Dokumen
		12 Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan & Pengendalian Limbah B3 Industri Sektor Penghasil	Provinsi Banten	1 Dokumen	47,787,000			1 Dokumen
		13 Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan & Pengendalian Bahan Perusak Ozon	Provinsi Banten	1 Dokumen	47,787,000			1 Dokumen
		14 Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan & Pengendalian Limbah Medis Rumah Sakit	Provinsi Banten	1 Dokumen	47,787,000			1 Dokumen
		15 Penyusunan Rapergub Tata Laksana Perijinan Pengelolaan LB3	Provinsi Banten	1 Dokumen	200,000,000			1 Dokumen
<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan</b>		<b>950,000,000</b>	<b>APBD</b>	-
		1 Rapat Koordinasi Pemantauan Adipura	Provinsi Banten	1 Dokumen Prosiding	109,090,000			1 Dokumen Prosiding
		2 Rapat Evaluasi Pemantauan Adipura	Provinsi Banten	1 Dokumen Prosiding	109,090,000			1 Dokumen Prosiding
		3 Pemantauan Adipura	Provinsi Banten	1 Dokumen Hasil Pemantauan	130,840,000			1 Dokumen Hasil Pemantauan
		10 Verifikasi dan Penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Banten	Provinsi Banten	1 Dokumen / 48 Sekolah	111,385,000			1 Dokumen / 48 Sekolah
		11 Bimtek penyusunan dokumen sekolah adiwiyata	Provinsi Banten	1 Dokumen / 100 orang	347,065,000			1 Dokumen / 100 orang
		13 Publikasi Lingkungan Hidup Tahun 2016	Provinsi Banten	3 Dokumen Prosiding	142,530,000			3 Dokumen Prosiding
<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>Pengkajian Dampak Lingkungan</b>		<b>1,000,000,000</b>	<b>APBD</b>	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Indikator Kinerja Kegiatan (Tolak Ukur)	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan M	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Per Program/Kegiatan/Tolak Ukur	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		1 Fasilitasi Tata Kerja Komisi Penilai Amdal (KPA) dan Sekretariat KPA	Provinsi Banten	1 Dokumen	116,551,000			1 Dokumen	
		2 Rapat Kerja Komisi Penilai Amdal Daerah Provinsi Banten/Kab/Kota	Provinsi Banten	1 Dokumen 60 Orang	154,729,000			1 Dokumen 60 Orang	
		3 Penyusunan Laporan RKL RPL KP3B,Badan Diklat, RSUD Malingping	Provinsi Banten	6 dokumen	300,000,000			6 dokumen	
		4 Penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH)	Provinsi Banten	1 dokumen	428,720,000			1 dokumen	
<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup</b>		<b>975,000,000</b>	<b>APBD</b>	-	
				1 Bintek penataan hukum lingkungan pada perusahaan	Provinsi Banten	55 orang (industri)	189,045,500	APBD	55 orang (industri)
				2 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup se- Provinsi Banten	Provinsi Banten	1 dok	176,162,500	APBD	1 dok
				3 Fasilitasi Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu Provinsi Banten	Provinsi Banten	1 dok	393,552,500	APBD	1 dok
				4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Kasus – Kasus dan Perusakan Lingkungan Hidup	Provinsi Banten	1 dok laporan monev	23,096,000	APBD	1 dok laporan monev
				5 Penanganan Kasus-Kasus akibat Dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan oleh Tim Pos Pengaduan/Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu	Provinsi Banten	10 kasus	193,143,500	APBD	10 kasus
<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan</b>		<b>950,000,000</b>	<b>APBD</b>	-	
				1 Bimtek Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	Provinsi Banten	40 Orang (stakeholder)	164,745,000		40 Orang (stakeholder)
				2 Bimtek Manajemen Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan	Provinsi Banten	40 Orang (Aparatur)	200,439,000		40 Orang (Aparatur)
				3 Peningkatan Kapasitas SDM Pengloalaan Lingkungan	Provinsi Banten	10 Orang (Aparatur)	80,060,000		10 Orang (Aparatur)
				4 Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan	Provinsi Banten	300 Orang (Masyarakat),	362,046,000		100 orang; 2 hari; 1 dok
				5 Sosialisasi Kalpataru	Provinsi Banten	35 Orang (Stakeholder)	142,710,000		102 orang; 2 hari; 1 dok
<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>Pengujian dan analisis laboratorium untuk seluruh komponen lingkungan</b>		<b>900,000,000</b>	<b>APBD</b>		
				<i>Tambahan kegiatan baru (UPT lab)</i>					
				pengambilan sampel air dan udara	Provinsi Banten	400 kali	436,990,000		
				kalibrasi alat laboratorium	Provinsi Banten	1 paket	200,000,000		
				Kalibrasi alat ukur kimia	Provinsi Banten	1 paket	134,210,000		
				Pengelolaan IPAL laboratorium	Provinsi Banten	1 paket	75,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Indikator Kinerja Kegiatan (Tolak Ukur)	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan M Target Capaian Kinerja
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Per Program/Kegiatan/Tolak Ukur	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Konsultasi teknis pelayanan Laboratorium Lingkungan ke Kemen LH	Provinsi Banten	10 kali	26,400,000			
		konsultasi teknis pelayanan laboratorium lingkungan di Jawa Barat	Provinsi Banten	10 kali	27,400,000			
<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan</b>	<b>Tambahan kegiatan baru (UPT lab)</b>	<b>500,000,000</b>	<b>APBD</b>	
		Akreditasi Laboratorium Lingkungan	Provinsi Banten	Sertifikat akreditasi	229,975,000			
		Pembuatan Panduan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan	Provinsi Banten	1 dok	125,616,700			
		Uji Banding Antar Staf Laboratorium Lingkungan dan Uji Profisiensi	Provinsi Banten	20 staf; 10 lab	93,284,150			
		Audit Internal Laboratorium Lingkungan	Provinsi Banten	2 dokumen	51,124,150			
<b>1</b>	<b>8</b>	<b>2</b>		<b>Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup</b>				-
		Persentase peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung (%)						-
<b>1</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Konservasi dan Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam</b>		<b>1,000,000,000</b>	<b>APBD</b>	-
		1 Sosialisasi Profil DAS (DAS Ciliman dan Cisadane )	Provinsi Banten	120 Orang (stake holder); 2 dok	100,000,000			120 Orang (stake holder); 2 dok
		2 Sosialisasi Profil Ekosistem Pegunungan di kawasan akarsari	Provinsi Banten	60 Orang (stake holder); 1dok	50,000,000			60 Orang (stake holder); 1dok
		3 Workshop technical SIGNsmart gas rumah kaca (sektor aflu dan non aflu)	Provinsi Banten	160 Orang (stakeholder); 1 dok	200,000,000			160 Orang (stakeholder); 1 dok
		4 workshop evaluasi perhitungan potensi emisi gas rumah kaca	Provinsi Banten	75 Orang (aparatur); 1 dok	150,000,000			
		5 Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan serta Rencana Aksi Daerah (RAD) gas rumah kaca sektor limbah di Provinsi Banten	Provinsi Banten	1 dok	200,000,000			1 dok
		6 Fasilitasi Program MIH (Menuju Indonesia Hijau)	Kab. Serang, Kab. Pandeglang, Kab. Lebak	1 dok	212,000,000			1 dok
		7 Forum Kemitraan Lingkungan Hidup	Provinsi Banten	1 Forum	50,000,000			1 Forum
		8 Fasilitasi koordinasi pengelolaan DAS	Provinsi Banten	3 kali	38,000,000			3 kali
<b>1</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air</b>		<b>1,000,000,000</b>	<b>APBD</b>	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Indikator Kinerja Kegiatan (Tolak Ukur)	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan M Target Capaian Kinerja
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Per Program/Kegiatan/Tolak Ukur	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		1 Semiloka Program Perlindungan dan Penanganan Kerusakan Situ Terpadu di Kota Tangerang Selatan/Kota Tangerang/Kabupaten Tangerang	Kota Tangerang Selatan/Kota Tangerang/Kab. Tangerang	60 orang peserta, dan 1 (satu) dokumen Program Rencana Aksi Perlindungan dan Penanganan Kerusakan Situ Terpadu	150,000,000			60 orang peserta, dan 1 (satu) dokumen Program Rencana Aksi Perlindungan dan Penanganan Kerusakan Situ Terpadu
		2 Pemantauan Kerusakan di Hulu dan Tengah Aliran Sungai Cisadane Wilayah Provinsi Banten	Kota Tangerang Selatan-Kota Tangerang-Kab. Tangerang	1 (satu) dokumen Hasil Pemantauan, 1 Sungai	60,000,000			1 (satu) dokumen Hasil Pemantauan, 1 Sungai
		3 Sosialisasi Profil Kerusakan Mata Air di 3 kabupaten Wilayah Provinsi Banten	Kab. Serang-Kab. Pandeglang-Kab. Lebak	60 orang	150,000,000			60 orang
		4 Semiloka Program Pemulihan Kerusakan Mangrove di Kabupaten Serang/ Kota Serang/Kabupaten Pandeglang	Kab. Serang/Kota Serang/Kab. Pandeglang	1 (satu) dokumen Semiloka, 60 orang peserta, dan 1 (satu) dokumen Program Rencana Aksi Pemulihan Kerusakan	160,000,000			1 (satu) dokumen Semiloka, 60 orang peserta, dan 1 (satu) dokumen Program Rencana Aksi Pemulihan Kerusakan Mangrove
		5 Penyusunan Profil dan Data Kerusakan Terumbu Karang dan Padang Lamun di Wilayah Provinsi Banten	Provinsi Banten	4 dok	200,000,000			4 dok
		6 Penyusunan Profil dan Data Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut di Wilayah Provinsi Banten	Provinsi Banten	1 dok	200,000,000			1 dok
		7 Rapat Koordinasi Optimalisasi Peran Dunia Usaha dalam Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Mangrove di Wilayah Provinsi Banten	Kab. Tangerang	1 (satu) dokumen Laporan Rapat Koordinasi Optimalisasi Peran Dunia Usaha dalam Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Mangrove	80,000,000			1 (satu) dokumen Laporan Rapat Koordinasi Optimalisasi Peran Dunia Usaha dalam Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Mangrove
1	20	9	<b>Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah</b>					-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Indikator Kinerja Kegiatan (Tolak Ukur)	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan M Target Capaian Kinerja
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Per Program/Kegiatan/Tolak Ukur	Sumber Dana		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	9	1	<b>Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset</b>			-	<b>200,000,000</b>	<b>APBD</b>		-
				1 Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan I	Provinsi Banten	1 dok		12,835,800			1 dok
				2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Prognosis	Provinsi Banten	1 dok		45,924,700			1 dok
				3 Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III	Provinsi Banten	1 dok		12,218,600			1 dok
				4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Provinsi Banten	1 dok		14,761,000			1 dok
				5 Sosialisasi Tata Kelola Keuangan	Provinsi Banten	30 orang		25,776,200			30 orang
				6 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Provinsi Banten	1 dok		23,245,200			1 dok
				7 Pelaksanaan tim satgas SPIP BLHD Provinsi Banten	Povinsi Banten	1 dok/12 orang		14,033,800			1 dok/12 orang
				8 Rekapitulasi dokumen SPP, SPM dan SP2D	Povinsi Banten	1 dok		8,689,800			1 dok
				9 Penataan dan Penelolaan SIMDA keuangan	Povinsi Banten	1 dok		27,760,000			1 dok
				10 Valdasi dokumen perbendaharaan	Povinsi Banten	1 dok		14,754,900			1 dok
1	20	9	2	<b>Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan</b>				<b>950,000,000</b>	<b>APBD</b>		-
				1 Finalisasi LAKIP BLHD Provinsi Banten Tahun 2015	Provinsi Banten	1 (satu) Dokumen		16,835,000			1 (satu) Dokumen
				2 Finalisasi LKPJ BLHD Provinsi Banten Tahun 2015	Provinsi Banten	1 (Satu) Dokumen		16,835,000			1 (Satu) Dokumen
				3 Finalisasi LPPD BLHD Provinsi Banten Tahun 2015	Provinsi Banten	1 (Satu) Dokumen		16,835,000			1 (Satu) Dokumen
				4 Finalisasi Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2016	Provinsi Banten	1 dok		8,610,000			1 dok
				5 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelengkapan Perencanaan Kegiatan BLHD Provinsi Banten Tahun 2017	Provinsi Banten	1 (satu) kegiatan, 30 orang peserta		26,936,000			1 (satu) kegiatan, 30 orang peserta
				6 Penyusunan Rencana Kerja BLHD Provinsi Banten Tahun 2017	Provinsi Banten	1 (satu) Dokumen, 30 orang peserta		182,229,000			1 (satu) Dokumen, 30 orang peserta
				7 Forum SKPD Bidang LH Tahun 2016	Provinsi Banten	1 (satu) kegiatan, 55 orang peserta		200,494,000			1 (satu) kegiatan, 55 orang peserta
				8 Bintek Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2016	Provinsi Banten	1 (satu) kegiatan, 20 orang peserta		25,842,000			1 (satu) kegiatan, 20 orang peserta
				9 fasilitasi penerapan dan pelaksanaan SPM Bidang LH kab/kota	Provinsi Banten	1 (satu) kegiatan, 30 orang peserta		118,594,000			1 (satu) kegiatan, 30 orang peserta
				10 Penyusunan SPM Bidang LH tingkat Provinsi tahun 2015	Provinsi Banten	1 (satu) Dokumen		20,665,000			1 (satu) Dokumen
				11 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2016	Provinsi Banten	1 dok		103,166,000			1 dok

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Indikator Kinerja Kegiatan (Tolak Ukur)	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan M Target Capaian Kinerja
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Per Program/Kegiatan/Tolak Ukur	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		12 Penyusunan laporan evaluasi renja tahun 2016	Provinsi Banten	4 dok	18,840,000			4 dok
		13 Penyusunan laporan realisasi barang dan jasa	Provinsi Banten	4 dok	19,240,000			4 dok
		14 Penyusunan laporan fisik dan keuangan bulanan	Provinsi Banten	12 dok	19,240,000			12 dok
		15 Penyusunan rancangan Perjanjian Kinerja Tahun 2017	Provinsi Banten	1 dok	8,610,000			1 dok
		16 Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2016	Provinsi Banten	1 (satu) Dokumen	14,710,000			1 (satu) Dokumen
		17 Penyusunan RKAP dan DPPA BLHD Provinsi Banten Tahun 2016	Provinsi Banten	1 (satu) Dokumen	33,140,000			1 (satu) Dokumen
		18 Penyusunan RKA dan DPA BLHD Provinsi Banten Tahun 2017	Provinsi Banten	1 (satu) Dokumen	34,560,000			1 (satu) Dokumen
		19 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Provinsi Banten	2 (dua) Dokumen	14,760,000			2 (dua) Dokumen
		20 Penyusunan Draft LAKIP BLHD Provinsi Banten Tahun 2016	Provinsi Banten	1 (satu) Dokumen	16,735,000			1 (satu) Dokumen
		21 Penyusunan Draft LKPJ BLHD Provinsi Banten Tahun 2016	Provinsi Banten	1 (Satu) Dokumen	16,735,000			1 (Satu) Dokumen
		22 Penyusunan Draft LPPD BLHD Provinsi Banten Tahun 2016	Provinsi Banten	1 (Satu) Dokumen	16,389,000			1 (Satu) Dokumen
1	20	10		<b>Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur</b>				-
1	20	10	1	<b>Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran</b>		<b>1,500,000,000</b>	<b>APBD</b>	-
				1 Penyediaan Tenaga Kerja Satpam, Supir dan Pramubakti	Provinsi Banten	16 orang; 12 bulan	405,000,000	16 orang; 12 bulan
				2 Penyediaan Tenaga Kerja Cleaning Cervice Outsourcing	Provinsi Banten	10 orang; 11 bulan	302,138,500	10 orang; 11 bulan
				3 Penyediaan Penunjang Operasional Kantor	Provinsi Banten	12 bulan	792,861,500	12 bulan
				<b>Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran UPT Laboratorium</b>		<b>700,000,000</b>		-
				<i>Tambahan kegiatan baru (UPT lab)</i>				
				1 Penyediaan tenaga kerja Analis, Pramubakti, supir dan operasional kantor	Provinsi Banten	13 orang	241,200,000	13 orang
				2 Persediaan Sarana dan Prasarana penunjang operasional kantor/ laboratorium	Provinsi Banten	12 bulan	458,800,000	12 bulan
1	20	10	2	<b>Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah</b>		<b>700,000,000</b>	<b>APBD</b>	-
				1 Rapat Koordinasi dalam Daerah	Provinsi Banten	12 bulan	288,950,000	12 bulan
				2 Rapat Koordinasi Keluar Daerah	Luar Provinsi Banten	12 bulan	411,050,000	12 bulan
1	20	10	3	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>1,000,000,000</b>	<b>APBD</b>	-
				1 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) (Mobil Dinas Ess III)	Provinsi Banten	1 Unit	248,675,000	1 Unit
				2 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua)	Provinsi Banten	2 Unit	37,065,000	2 Unit
				3 Pengadaan Personal Komputer (PC)	Provinsi Banten	3 Unit	54,565,000	3 Unit



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Indikator Kinerja Kegiatan (Tolak Ukur)	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan M
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Per Program/Kegiatan/Tolak Ukur	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		4 Pengadaan Mesin foto Copy	Provinsi Banten	1 unit	31,300,000			1 unit
		5 Pengadaan Laptop	Provinsi Banten	2 unit	36,665,000			2 unit
		6 Pengadaan TV LED 32"	Provinsi Banten	3 unit	16,300,000			3 unit
		7 Pengadaan Pendingin / Kulkas 2 Pintu	Provinsi Banten	1 unit	7,000,000			1 unit
		8 Pengadaan Dispenser	Provinsi Banten	2 unit	5,000,000			2 unit
		9 Pengadaan Printer Injeksi	Provinsi Banten	10 unit	23,300,000			10 unit
		10 Pengadaan Air Conditioner (AC)	Provinsi Banten	10 Unit	51,065,000			10 Unit
		11 Pengadaan Kamera Pocket Waterprof, Kamera LSR dan Handycam	Provinsi Banten	7 Unit	46,300,000			7 Unit
		12 Penambahan Daya Listrik	Provinsi Banten	18000 Watt	31,300,000			18000 Watt
		13 Pengadaan Instalasi Jaringan Telepon PABX	Provinsi Banten	1 Paket	51,300,000			1 Paket
		14 Pengadaan Meja dan Kursi Kerja	Provinsi Banten	116 Unit	112,565,000			116 Unit
		15 Pengadaan Lemari arsip, Lemari Reagen, Rak Reagen dan Filing Kabinet	Provinsi Banten	42 unit	85,300,000			42 unit
		18 Pengadaan Sofa	Provinsi Banten	2 Set	22,300,000			2 Set
		19 Pengadaan lemari hias souvenir	Provinsi Banten	2 Set	22,300,000			
		20 Pengadaan Finggerpin Lock	Provinsi Banten	1 set	21,300,000			1 set
		21 Pengadaan CCTV	Provinsi Banten	1 Paket	24,300,000			1 Paket
		22 Pengadaan Runing Teks (Ucapan Selamat Datang)	Provinsi Banten	1 Paket	22,300,000			1 Paket
		23 Pengadaan Alat Potong Rumput	Provinsi Banten	3 Unit	13,500,000			3 Unit
		24 Belanja Modal Pembuatan Tempat Sampah Permanen (3R)	Provinsi Banten	1 Paket	36,300,000			1 Paket
<b>1</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana</b>		<b>970,000,000</b>	<b>APBD</b>	-
				1 Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 (Dua)	Provinsi Banten	19 unit	40,000,000	19 unit
				2 Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (Empat)	Provinsi Banten	18 unit	199,115,000	18 unit
				3 Pemeliharaan Sarana dan prasarana kantor	Provinsi Banten	1 paket	379,669,000	1 paket
				4 Penyediaan Penunjang Operasional Kantor BBM Kendaraan Roda 2 (dua)	Provinsi Banten	27360 Liter	246,240,000	27360 Liter
				5 Penyediaan Penunjang Operasional Kantor BBM Kendaraan Roda 4 (Empat)	Provinsi Banten	11664 Liter	104,976,000	11664 Liter
<b>1</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan</b>		<b>200,000,000</b>	<b>APBD</b>	-
				Pemeliharaan Gedung dan peralatan Laboratorium Lingkungan		1 gedung dan Peralatan Laboratorium	200,000,000	1 gedung dan Peralatan Laboratorium
<b>1</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>		<b>250,000,000</b>	<b>APBD</b>	-
				1 Pekan Ilmiah Internal BLHD Provinsi Banten	Provinsi Banten	62 Orang Pegawai BLHD Provinsi Banten	136,318,000	62 Orang Pegawai BLHD Provinsi Banten
				2 Fasilitasi Kenaikan Gaji, pangkat berkala dan Golongan PNS BLHD Provinsi Banten	Provinsi Banten	62 Orang Pegawai BLHD Provinsi Banten	11,164,000	62 Orang Pegawai BLHD Provinsi Banten
				3 Pemutahiran data kepegawaian BLHD Provinsi Banten	Provinsi Banten	70 Data Kepegawai BLHD Provinsi Banten	38,628,000	102,732,500 60 Org; 24 kali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Indikator Kinerja Kegiatan (Tolak Ukur)	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan M	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Per Program/Kegiatan/Tolak Ukur	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		Peningkatan Kemampuan dan Eksistensi Aparatur BLHD Provinsi Banten	Provinsi Banten	82 Orang, 12 Kali	63,890,000				
1	20	10	6	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur pada UPT Lab</b>	<b>Tambahan kegiatan baru (UPT lab)</b>				
				Bimbingan Teknis Pengambilan Sampel Kualitas Udara	Provinsi Banten	25 orang	50,000,000		25 orang
				Bimbingan Teknis Pengambilan Sampel Kualitas Air	Provinsi Banten	25 orang	50,000,000		25 orang
				Bimbingan Teknis Pengujian Kualitas Udara	Provinsi Banten	25 orang	50,000,000		25 orang
				Bimbingan Teknis Kualitas Air Parameter Logam	Provinsi Banten	25 orang	50,000,000		25 orang
				Bimbingan Teknis Kualitas Air Parameter Organik	Provinsi Banten	25 orang	50,000,000		25 orang
1	23	1		<b>Penyediaan Data Pembangunan Daerah</b>					-
1	23	1	1	<b>Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan</b>			<b>250,000,000</b>	<b>APBD</b>	-
				1 Pengolahan data lingkungan hidup	Provinsi Banten	1 dok; pengelolaan website	136,140,000		1 dok; pengelolaan website
				2 Penyusunan data dan Informasi Pembangunan	Provinsi Banten	1 dok	94,540,000		1 dok
				3 Fasilitasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Provinsi Banten	1 dok	19,320,000		1 dok
									-
<b>Jumlah</b>							<b>17,000,000,000</b>		

Serang, Juni 2015  
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HI  
PROVINSI BANTEN

Drs. M. NATSIR AZIS, M.SI  
NIP. 19581012 198603 1

aju Tahun 2017

Pagu Indikatif Per Program/Kegiatan/T olok Ukur
(10)
<b>1,540,000,000</b>
241,340,110
102,422,650
98,442,850
146,909,510
283,686,315
269,306,950
290,027,815
107,863,800
<b>1,490,500,000</b>
184,503,000
46,843,500
67,457,500

aju Tahun 2017

Pagu Indikatif Per Program/Kegiatan/T olok Ukur
(10)
26,603,500
61,945,400
157,980,900
157,931,400
129,572,300
68,216,500
160,299,700
51,449,200
52,565,700
52,565,700
52,565,700
220,000,000
<b>1,045,000,000</b>
119,999,000
119,999,000
143,924,000
122,523,500
381,771,500
156,783,000
<b>1,100,000,000</b>

**aju Tahun 2017**

<b>Pagu Indikatif Per Program/Kegiatan/T olok Ukur</b>
(10)
128,206,100
170,201,900
330,000,000
471,592,000
<b>1,072,500,000</b>
207,950,050
193,778,750
432,907,750
25,405,600
212,457,850
<b>1,045,000,000</b>
181,219,500
220,482,900
88,066,000
398,250,600
156,981,000
<b>990,000,000</b>
480,689,000
220,000,000
147,631,000
82,500,000

**aju Tahun 2017**

<b>Pagu Indikatif Per Program/Kegiatan/T olok Ukur</b>
(10)
29,040,000
30,140,000
-
<b>550,000,000</b>
252,972,500
138,178,370
102,612,565
56,236,565
-
-
<b>1,100,000,000</b>
110,000,000
55,000,000
220,000,000
165,000,000
220,000,000
233,200,000
55,000,000
41,800,000
<b>1,100,000,000</b>

aju Tahun 2017

Pagu Indikatif Per Program/Kegiatan/T olok Ukur
(10)
165,000,000
66,000,000
165,000,000
176,000,000
220,000,000
220,000,000
88,000,000
-

**aju Tahun 2017**

<b>Pagu Indikatif Per Program/Kegiatan/T olok Ukur</b>
(10)
<b>148,237,650</b>
14,119,380
50,517,170
13,440,460
16,237,100
28,353,820
25,569,720
15,437,180
30,536,000
16,230,390
<b>1,045,000,000</b>
18,518,500
18,518,500
18,518,500
9,471,000
29,629,600
200,451,900
220,543,400
28,426,200
130,453,400
22,731,500
113,482,600



aju Tahun 2017

Pagu Indikatif Per Program/Kegiatan/T olok Ukur
(10)
20,724,000
21,164,000
21,164,000
9,471,000
16,181,000
36,454,000
38,016,000
16,236,000
18,408,500
18,408,500
18,027,900
-
<b>1,650,000,000</b>
445,500,000
332,352,350
872,147,650
770,000,000
265,320,000
504,680,000
<b>770,000,000</b>
317,845,000
452,155,000
1,100,000,000
273,542,500
40,771,500
60,021,500

aju Tahun 2017

<b>Pagu Indikatif Per Program/Kegiatan/T olok Ukur</b>
(10)
34,430,000
40,331,500
17,930,000
7,700,000
5,500,000
25,630,000
56,171,500
50,930,000
34,430,000
56,430,000
123,821,500
93,830,000
24,530,000
24,530,000
23,430,000
26,730,000
24,530,000
14,850,000
39,930,000
<b>1,067,000,000</b>
44,000,000
219,026,500
417,635,900
270,864,000
115,473,600
220,000,000
220,000,000
<b>275,000,000</b>
149,949,800
12,280,400
42,490,800

**aju Tahun 2017**

<b>Pagu Indikatif Per Program/Kegiatan/T olok Ukur</b>
(10)
70,279,000
275,000,000
55,000,000
55,000,000
55,000,000
55,000,000
55,000,000
55,000,000
-
<b>275,000,000</b>
149,754,000
103,994,000
21,252,000
<b>18,628,237,650</b>

DUP DAERAH

M.Kes

. 015

**Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016  
Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten**

<b>Program/Kegiatan</b>	
<b>Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup</b>	
1	Pemantauan Kualitas Lingkungan
2	Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik, Limbah B3 Dan B3
3	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
4	Pengkajian Dampak Lingkungan
5	Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
6	Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan lingkungan
7	Pengujian dan analisis laboratorium untuk seluruh komponen lingkungan
8	Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan
<b>Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	
9	Konservasi dan Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam
10	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air
<b>Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah</b>	
11	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
12	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
<b>Program Pemeliharaan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	
13	Pengadaan Saran dan Prasarana Kantor
14	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
15	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan
16	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
17	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran UPT Laboratorium
18	Peningkatan Kapasitas aparatur
19	Peningkatan Kapasitas Aparatur pada UPT Lab
20	Rakor kedalam dan keluar daerah
<b>Program Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah</b>	
21	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
<b>JUMLAH</b>	



<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>	
	<b>8,030,000,000</b>
	1,400,000,000
	1,355,000,000
	950,000,000
	1,000,000,000
	975,000,000
	950,000,000
	900,000,000
	500,000,000
	<b>2,000,000,000</b>
	1,000,000,000
	1,000,000,000
	<b>1,150,000,000</b>
	950,000,000
	200,000,000
	<b>5,570,000,000</b>
	1,000,000,000
	970,000,000
	200,000,000
	1,500,000,000
	700,000,000
	250,000,000
	250,000,000
	700,000,000
	<b>250,000,000</b>
	250,000,000
	<b>17,000,000,000</b>

Serang, Juni 2015  
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
PROVINSI BANTEN

Drs. M. NATSIR AZIS, M.SI, M.Kes  
NIP. 19581012 198603 1 015

, 31 Oktobe  
Kepala  
Provinsi

**Dr. Ir. H.**  
81006 19820







LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BANTEN TAHUN 2016

**DAFTAR USULAN KEGIATAN SUMBER DANA DEKONSENTRASI TAHUN 2016  
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI BANTEN**

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>VOLUME</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>	<b>K/L TERKAIT</b>	<b>SUMBER DANA</b>
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui Program PROPER	Kota Cilegon, Kota Tangerang, Tangerang, Serang	80 industri	1,000,000,000	KLH&Kehutanan	DK
2	Pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional	Kota Serang dan Tangerang Selatan	2 Kota	650,000,000	KLH&Kehutanan	DK
3	Pemantauan kualitas air sungai skala nasional dan/atau yang lintas batas negara	2 Sungai (Cisadane dan Cidurian)	8 titik, 6 kali	650,000,000	KLH&Kehutanan	DK
	<b>JUMLAH</b>			<b>2,300,000,000</b>		

Serang, Juni 2015  
KEPALA BADAN LINGKUNGAN H  
PROVINSI BANTEN

Drs. M. NATSIR AZIS, M.SI  
NIP. 19581012 198603



<b>KETERANGAN</b>
[8]

IDUP DAERAH

I

M.Kes

1 015







LAMPIRAN IV : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BANTEN TAHUN 20

**DAFTAR USULAN KEGIATAN SUMBER DANA DAK TAHUN 2016  
KABUPATEN/KOTA**

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>VOLUME</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>	<b>K/L TERKAIT</b>	<b>SUMBER DANA</b>
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>KABUPATEN LEBAK</b>						
1	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rangkasbitung	1 kelompok	127,600,000	KLH&Kehutanan	DAK
2	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air	Tersebar di Kab. Lebak	5.000 Unit Lubang Biopori	250,000,000	KLH&Kehutanan	DAK
3	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rangkasbitung	1 RTH	200,000,000	KLH&Kehutanan	DAK
<b>KABUPATEN PANDEGLANG</b>						
1	Program : Pengendalian Pencemaran dan Kualitas Lingkungan Hidup					
2	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Terutama Air					
3	Pekerjaan :					
	Pembuatan Sumur Resapan	SKPD dan Sekolah	20 Unit	200,000,000	KLHK	DAK
	Pembangunan Gudang Bank sampah	Kelurahan Saruni dan Cigadung	2 Unit	200,000,000	KLHK	DAK
	Pembuatan Rumah Kompos	Sekolah	4 Unit	120,000,000	KLHK	DAK
	Pengadaan Tong sampah terpilah (Organik : An Organik : B.3)	Sekolah dan Bank Sampah	300 Unit	390,000,000	KLHK	DAK
	Pengadaan Timbangan Duduk	Bank Sampah	2 Unit	8,000,000	KLHK	DAK
	Pengadaan Mesin Jahit	Bak Sampah dan Sekolah	6 Unit	13,200,000	KLHK	DAK
	Pengadaan Komposter Skala rumah Tangga	Bak Sampah dan Sekolah	200 Unit	60,000,000	KLHK	DAK
	Pengadaan Alat Lubang Bio pori	Bak Sampah dan Sekolah	40 buah	9,200,000	KLHK	DAK



<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>VOLUME</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>	<b>K/L TERKAIT</b>	<b>SUMBER DANA</b>
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Pengadaan Mesin Pencacah Saph Organik	Bak Sampah dan Sekolah	4 Unit	110,000,000	KLHK	DAK
	Pengadaan Kendaraan Roda Tiga	Bank Sampah	2 Unit	66,000,000	KLHK	DAK
4	Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam					
	Kegiatan : Pelestarian Sumber Daya Alam					
	Pekerjaan :					
	Pembuatan Taman Keanekaragaman Hayati Numpi	Blok Numpi Desa Kurungkambing Kecamatan Mandalawangi	30 Ha	9,000,000,000	KLHK	TP/UB/DAK
	Pembuatan Taman Keanekaragaman Hayati Sukalimas	Blok Sukalimas Kelurahan Cigadung Kecamatan Karangtanjung	6 Ha	3,000,000,000	KLHK	TP/UB/DAK
<b>KOTA TANGERANG SELATAN</b>						
	Pengendalian Pencemaran Lingkungan					
	Pencemaran Air	Sungai Pesangrahan, Sungai Angke dan Sungai Cisadane	3 titik lokasi sampling	150,000,000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DAK
	Pencemaran udara	Taman Tekno BSD, Kawasan Pergudangan Multi Guna	2 titik lokasi sampling udara ambien	150,000,000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DAK
	Pengaduan Masyarakat	Kantor BLHD Kota Tangerang Selatan	1 paket ruang dan sarana prasarana pengaduan masyarakat	150,000,000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DAK
	Konservasi dan Rehabilitasi SDA					

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>VOLUME</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>	<b>K/L TERKAIT</b>	<b>SUMBER DANA</b>
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Penghijauan Lingkungan	7 Kecamatan di Kota Tangerang Selatan	1000 pohon	500,000,000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DAK
	Sumber Resapan Air	7 Kecamatan di Kota Tangerang Selatan	300 titik	1,500,000,000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DAK
	Lubang Resapan Biopori	7 Kecamatan di Kota Tangerang Selatan	500 titik	115,000,000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DAK
KOTA SERANG						
	Penanaman lahan kritis	6 kec		3,419,921,000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DAK
	<b>JUMLAH</b>			<b>19,738,921,000</b>		

Serang, 6 Maret 201  
KEPALA BADAN LINGKUNGAN H  
PROVINSI BANTEN

Drs. M. NATSIR AZIS, M.SI  
NIP. 19581012 198603



<b>KETERANGAN</b>
[8]
Kawasan Sumber Mata Air

<b>KETERANGAN</b>
[8]

15  
IDUP DAERAH  
I

M.Kes  
1 015









**DAFTAR USULAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN TAHUN 2016 UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**

NO.	BIDANG URUSAN	KEGIATAN	LOKASI KAB/KOTA	SKPD TERKAIT KAB/KOTA	VOLUME	ANGGARAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Pengadaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Skala Perkotaan	Lebak	BLH Kab. Lebak	1 Unit	750,000,000
		pengelolaan limbah domestik disekitar pulau tunda dan pulau panjang	kab serang	BLHD Kab Serang	2 unit	500,000,000
		pengadaan alat lab air : Infrared Thermometer ( Mas Tech )	kota cilegon	BLHD Kota Cilegon	1 unit	300,000,000
		Pengadaan alat lab :Radio Detection RD 8000	kota cilegon	BLHD Kota Cilegon	1 unit	300,000,000
		Alat lab tanah ( Alat uji materi/kandungan bahan Padatan)	kota cilegon	BLHD Kota Cilegon	1 unit	200,000,000
		Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut di sekitar pantai Karanghantu	Kota Serang	BLHD Kota Serang	5 Ha	2,000,000,000
		Normaliasasi DAS Cibanten	Kota serang	BLHD Kota Serang	1 paket	1,500,000,000
		Penataan bantaran Sungai Cibanten	Kota Serang	BLHD Kota Serang		1,000,000,000
		penghijauan sekitar bantaran sungai Cibanten	Kota serang	BLHD Kota Serang	1 paket	1,000,000,000
		Papan informasi lingkungan	Kota serang	BLHD Kota Serang	1 paket	250,000,000
		<b>JUMLAH</b>				<b>7,800,000,000</b>

Serang, 6 Maret 2016  
 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
 PROVINSI BANTEN

Drs. M. NATSIR AZIS, M.SI,  
 NIP. 19581012 198603 1



KETERANGAN
[8]

5  
DUP DAERAH

